

**ABSTRAK**

Skripsi ini membahas tentang pelarangan buku di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010. Putusan Mahkamah tersebut berakibat Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan tersebut memberikan petunjuk bahwa mekanisme pelarangan buku harus melalui putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Masih banyak pihak yang belum memahami bagaimana standar hukum hak asasi manusia berpengaruh terhadap pengaturan perbukuan. Skripsi ini ditulis dengan metode penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus untuk menganalisis permasalahan hukum yang diangkat. Dari penelitian yang penulis lakukan diperoleh hasil bahwa pelarangan buku hanya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan pelarangan buku di Indonesia telah sesuai dengan standar hak asasi manusia. Pelarangan buku sebagai salah satu sarana kebebasan ekspresi harus dilaksanakan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Kata Kunci: Buku, Mahkamah Konstitusi, Hak Asasi Manusia

**ABSTRACT**

*This thesis discusses the banning of books in Indonesia after the Constitutional Court Number 6-13-20/PUU-VIII/2010. The decision concerned declares that Law Number 4/PNPS/1963 is contradictory to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Consequently, the decision sets a guidance that mechanism for banning books must be decided under a court decision which is legally binding. In fact, there are many parties who still do not understand how human rights law standard affect regulations on books. This thesis is written in a normative research method by using statute approach, conceptual approach and cases approach to analyzing the legal issues discussed. It is concluded that banning of books may only be done according to relevant laws and regulations. The regulation of book banning in Indonesia adopts human rights standards. Hence, book bans as a means of freedom of expression should be enforced with the principles of the rule of law and democracy.*

*Keywords: Books, Constitutional Court, Human Rights*